

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

DOKUMEN PENGUAT SKRIPSI PENULIS MENGENAI: PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUNGAN NEGARA dalam putusan 21/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG. (yang akan di lampirkan di bukti berikutnya)

Latar Belakang

Kebijakan keuangan negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi mengatur perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan stabilitas ekonomi, efektivitas penggunaan anggaran, serta akuntabilitas keuangan negara.

Pemahaman terhadap kebijakan keuangan negara diperlukan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengelolaan keuangan negara dalam berbagai sektor.

Kerangka Kebijakan

Secara normatif, kebijakan keuangan negara dilaksanakan melalui pengaturan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan aset negara, serta pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Kebijakan ini juga berkaitan erat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Analisis Singkat

Kebijakan keuangan negara tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdimensi hukum. Setiap kebijakan dan tindakan pengelolaan keuangan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.